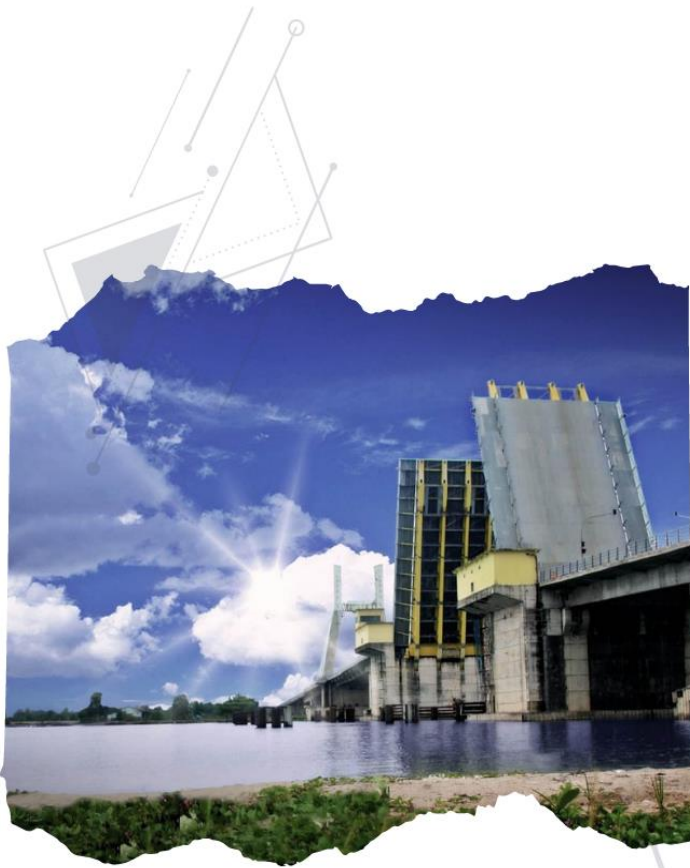




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan merupakan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang. Diharapkan melalui Renstra ini arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang.

Untuk penyempurnaan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (stakeholder) sangat diharapkan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di OPD Dinas Pariwisata dan bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang,

Drs. Waspada
Pembina
NIP 196705051998021001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III-3
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri	
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas	VII-2
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berkembang pesat menjadi pusat seluruh kegiatan wilayah termasuk berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang. Pembangunan Kepariwisata sudah saatnya dilaksanakan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Pembangunan sektor kepariwisataan memiliki keunikan karena sifatnya yang interdependensi karena pembangunannya harus melibatkan berbagai sektor dan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara esensial telah merubah format klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang yang menonjol dan dominan pada sektor perdagangan, industri dan jasa sangat memungkinkan untuk disinergikan dengan pengembangan kepariwisataan. Aksesibilitas menuju Kota Pangkalpinang saat ini tergolong lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 60 menit perjalanan dari Jakarta dengan 8 flight penerbangan PP, sedangkan akses lain dengan rute tujuan Palembang dan Tanjung Pandan relatif singkat. Disamping itu Pangkalpinang juga memiliki pelabuhan laut Pangkalbalam yang disamping berfungsi sebagai pelabuhan barang juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. Kemudian aksesibilitas ke masing-masing destinasi pariwisata relatif mudah dan terjangkau dengan kualitas jalan dan transportasi yang memadai, fasilitas akomodasi pun relatif tersedia dan cukup memadai.

Berdasarkan gambaran potensi-potensi di atas dan melihat salah satu sektor yang akan dikembangkan adalah investasi sektor kepariwisataan, maka terdapat beberapa isu aktual yang dianggap sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yaitu belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan bidang kepariwisataan, kemudian pembangunan bidang kepariwisataan masih kurang melibatkan stakeholders baik pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, pelaku budaya dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, isu selanjutnya adalah kurangnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kepariwisataan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menangani kepariwisataan. Ancaman kerusakan destinasi pariwisata oleh oknum anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab, serta pembangunan kepariwisataan belum dianggap sebagai sektor andalan.

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.

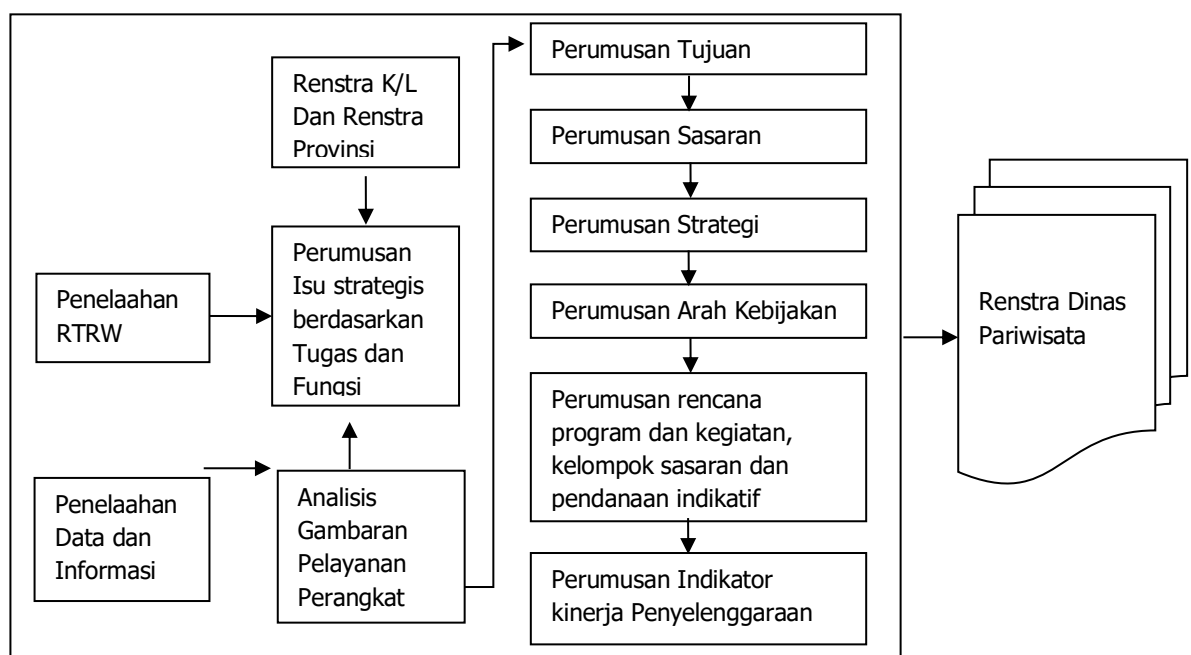
Kemudian pada tahun 2019 telah ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, sehingga terjadilah perubahan pada RPJMN dan skala prioritas nasional terhadap pembangunan, salah satunya terhadap sektor pariwisata sehingga berimplementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan,

pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Disusul dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga adanya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pariwisata, Revisi Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Tahapan penyusunan Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Transisi Dinas Pariwisata

Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pilihan Pariwisata selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telaahan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

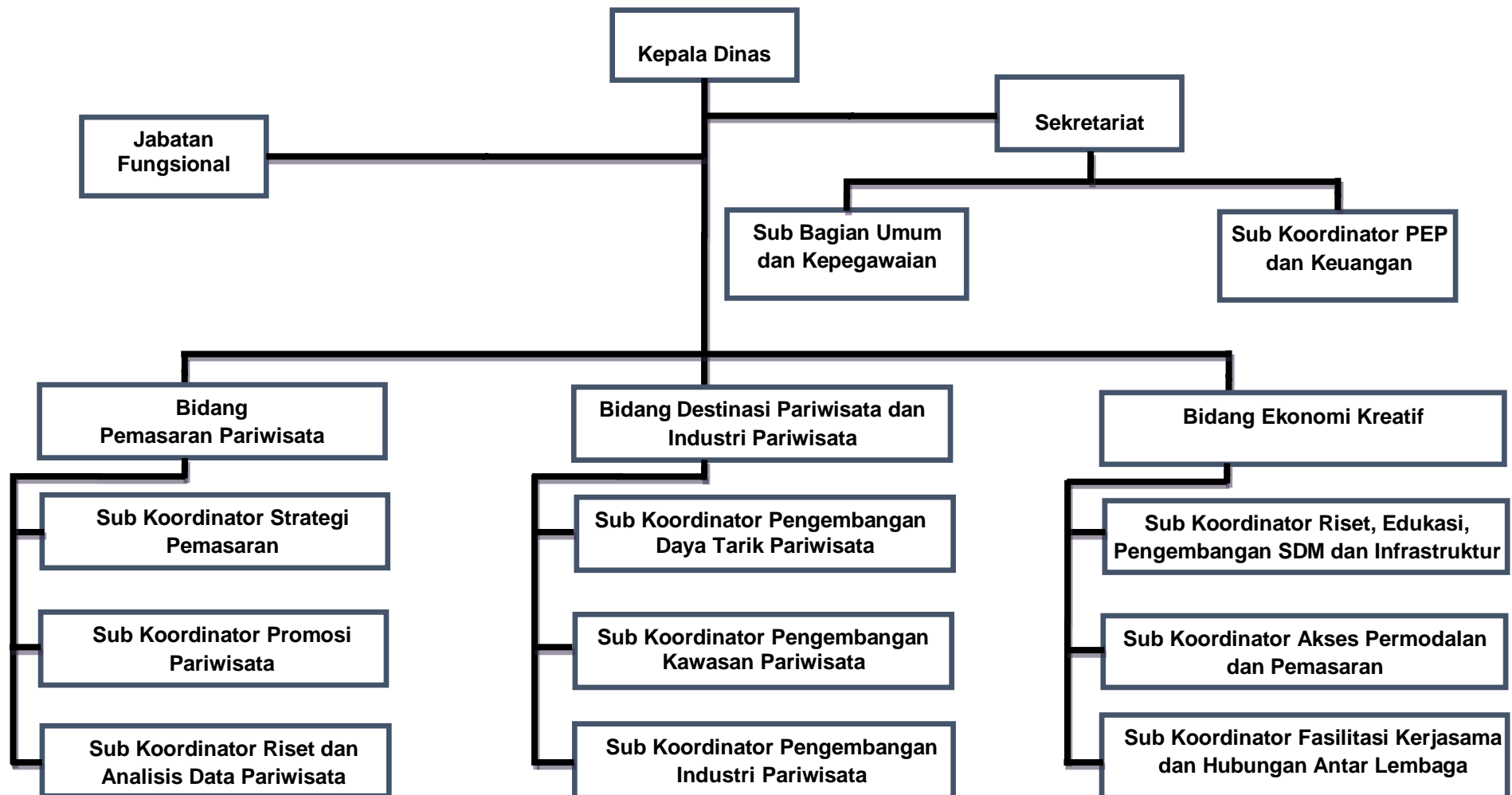
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator PEP dan Keuangan
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Strategi Pemasaran;
 2. Sub Koordinator Promosi Pariwisata; dan
 3. Sub Koordinator Riset dan Analisis Data Pariwisata;
- d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 2. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 3. Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
 2. Sub Koordinator Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
 3. Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

2.1.1. Uraian Tugas

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata;
- d. penetapan rencana kerja dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Pariwisata;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan Pariwisata di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pariwisata;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pariwisata;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pariwisata; dan ;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pariwisata dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan industri pariwisata Pemerintah Kota;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;

- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata; dan;
- 6) melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota; dan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tata kelola peningkatan kebijakan teknis bidang Ekonomi Kreatif di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) pelaksanaan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif;
- 3) pelaksanaan standar kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif skala kota;
- 4) pelaksanaan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah di Kota;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pengembangan Ekonomi Kreatif lingkup Pemerintah Kota;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan pengembangan Ekonomi Kreatif Kota; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terhitung tanggal 31 Juli 2024 sebanyak 75 orang, terdiri dari 28 ASN (6 laki-laki dan 22 perempuan) dan 47 non ASN (20 laki-laki dan 27 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, jumlah ASN yang berpendidikan S2 sejumlah 3 orang, S1 sejumlah 22 orang dan D3 sejumlah 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pariwisata Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Tamat	-	-	7	9	16
2	SD Sederajat	-	-	-	3	3
3	SMP Sederajat	-	-	-	2	2
3	SMA Sederajat	-	-	9	7	16
4	D3	-	3	-	2	5
5	S1	6	16	4	4	30
6	S2	-	3	-	-	3
7	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		6	22	20	27	75

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Dilihat dari golongannya, pada tahun 2024 pegawai PNS Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terdiri dari golongan IV sejumlah 4 orang, golongan III sejumlah 23 orang dan golongan II sejumlah 2 orang, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pariwisata Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	4	17	21
3	Golongan IV	1	3	4
TOTAL		5	22	27

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata meliputi Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (Semester II)

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Unit	Jumlah	Kondisi
1	Tanah		2.376.660.000,00	Baik
2	Peralatan dan mesin		12.257.477.967,38	Baik
	Pompa Air	4		Baik
	Mini Bus Suzuki Ertiga	1		Baik
	Sepeda Motor	4		Baik
	Perkakas bengkel khusus lainnya	2		Baik
	Termometer Standar	1		Baik
	Alat pemeliharaan tanaman	1		Baik
	Alat Prosesing lainnya (Wasser)	5		Baik
	Mesin Ketik Manual Portabel	3		Baik
	Mesin Ketik Manual Portabel	1		RB
	Lemari Besi/Metal	61		Baik
	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1		Baik
	Papan Visual/Papan Nama	1		Baik
	White Board	4		Baik
	Peta	1		Baik
	Alat Penghancur Kertas	1		Baik
	Panel Pameran	13		RB
	Stempel Timbul/Bulat	1		Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		Baik
	Papan Pengumuman	1		Baik
	Teralis	1		Baik
	Alat Kantor Lainnya	23		Baik
	Alat Kantor Lainnya	11		RB

	Alat Kantor Lainnya	1		KB
	Meja	55		Baik
	Meja	2		RB
	Meja	2		KB
	Kursi	75		Baik
	Kursi	13		RB
	Kursi	6		KB
	Sofa	31		Baik
	Meubeler lainnya	5		Baik
	Mesin Pemotong Rumput	1		RB
	Alat Pembersih lainnya	8		Baik
	Alat Pembersih lainnya	19		KB
	A.C.	17		Baik
	Kipas Angin	4		Baik
	Kipas Angin	7		RB
	Exhaust Fan	3		Baik
	Kompor Gas (Alat Dapur)	1		Baik
	Kompor Gas (Alat Dapur)	1		RB
	Tabung Gas	1		Baik
	Alat Dapur lainnya	6		Baik
	Alat Dapur lainnya	1		KB
	Televisi	4		Baik
	Televisi	1		KB
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1		KB
	Megaphone	2		Baik
	Megaphone	1		KB
	Microphone	2		Baik
	Tangga Aluminium	1		Baik
	Karpet	1		Baik
	Gordy/Kray	2		KB
	Tangki Air	2		Baik
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3		Baik
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1		KB
	Meja Kerja Pejabat	11		Baik
	Kursi Kerja	56		Baik
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1		Baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11		Baik

	Camera Film	2		Baik
	Alat Studio Lainnya	8		Baik
	Handy Talky (HT)	5		Baik
	Wireless Amplifier	1		Baik
	Alat Kesehatan Umum lainnya	9		Baik
	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1		Baik
	P.C Unit	25		Baik
	P.C Unit	3		RB
	Lap Top	9		Baik
	Lap Top	2		RB
	Note Book	1		RB
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16		Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		RB
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		Baik
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		RB
	Peralatan Komputer lainnya	2		Baik
3	Gedung dan bangunan		12.702.128.066,54	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1		Baik
	Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar	2		Baik
	Bangunan Gedung Pos Jaga	2		Baik
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	26		Baik
	Bangunan Fasilitas Umum	24		Baik
	Tugu/ Tanda Batas Administrasi	1		Baik
	Pagar	1		Baik
4	Jalan, Irigasi dan jaringan		3.069.567.659,27	Baik
	Jalan	3		Baik
	Bangunan air irigasi lainnya	9		Baik
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2		Baik
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	4		Baik

	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lain-lain	1		Baik
	Instalasi pembangkit listrik lainnya	30		Baik
	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1		Baik
	Jaringan listrik lainnya	9		Baik
5	Asset tetap lainnya		54.900.000,00	Baik
	Alat Musik Tradisional/Daerah	9		Baik
	Pahatan Kayu	1		Baik
	Barang Kerajinan Lain-lain	1		Baik
	TOTAL		30.460.733.693,19	

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang meliputi Pemerintahan **URUSAN PARIWISATA**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kepariwisataan melalui pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.

Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan target indikator tujuan PDRB perkapita.

Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata adalah meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah dengan target indikator sasaran PAD sektor pariwisata.

Pada tahun 2018-2023 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan antara lain:

1. Tingkat hunian akomodasi ke Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7 persen pertahun;
2. Berkembangnya jumlah usaha jasa pariwisata yang berkualitas di Kota Pangkalpinang sebagai penunjang ekonomi kreatif;
3. Bertambahnya jumlah destinasi wisata di Kota Pangkalpinang.

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata			1 jenis					1 jenis					100%				
2	Jumlah jenis pelayanan informasi wisata			6 jenis					6 jenis					100%				
3	Jumlah pameran yang diikuti/diselerengg arakan dalam 1 tahun			1 kali					1 kali					100%				
4	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata			174 orang					174 orang					100%				
5	Jumlah objek wisata unggulan yang dipelihara			7 objek					7 objek					100%				
6	Tersedianya gapura identitas			1 paket					1 paket					100%				
7	Tersedianya kios cinderamata			10 unit					10 unit					100%				
8	Tersedianya plaza pusat jajanan kuliner			450m2					450m2					100%				
9	Tersedianya jalur pajalan kaki			1 paket					1 paket					100%				
10	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sadar wisata			50 orang					50 orang					100%				

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

11	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			160 orang					160 orang					100%				
12	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan				3%					3%					100%			
13	Jumlah jenis pelayanan informasi wisata				6 jenis					6 jenis					100%			
14	Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata				1 media					1 media					100%			
15	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata				1 dokumen					1 dokumen					100%			
16	Jumlah objek wisata unggulan yang dipelihara				1 objek					1 objek					100%			
17	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata				80 orang					80 orang					100%			
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					10%	10%				10,33%	16.28%				103,30 %	162.8 %	
19	proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)					5.2%	5.35%				4.15%	4.15%				79.8%	77.57 %	
20	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1 kawasan	1 kawasan				1 kawasan	1 kawasan				100%	100%	
21	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata					1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				100%	100%	
22	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata					1 destinasi	1 destinasi				1 destinasi	1 destinasi				100%	100%	

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

23	Jumlah entitas pengelolaan destinasi					1 destinasi	1 destinasi				1 destinasi	1 destinasi				100%	100%	
24	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba					200 orang	10 orang				0 orang	160 orang				0%	1600 %	
25	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan					10%	10%				31.54%	40.32%				315,40 %	403.2 %	
26	Tingkat hunian akomodasi					50%	50%				21.59%	34.06%				43.18 %	68%	
27	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara					312 orang	343 orang				163 orang	859 orang				52.24 %	250.43 %	
28	(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara					146.700 orang	161.370 orang				195.067 orang	273.093 orang				133%	169.23 %	
29	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					3 kali	3 kali				3 kali	5 kali				100%	100%	
30	Jumlah jenis media promosi					4 jenis	4 jenis				4 jenis	4 jenis				100%	100%	
31	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri					2 event	2 event				1 event	1 event				50%	50%	
32	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata					1 dokumen					1 dokumen					100%		
33	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif					35%	35%					36.36%					103.88 %	
34	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif					0	3 kali					2 kali					66,68 %	

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

35	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat					0	10 lokasi					47 lokasi					470,00 %	
36	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf					30%	35%				32%	38.77%					106.67 %	110.77 %
37	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja					10,72 %	11,59%				3,58%	9.23%					33.4%	79.63 %
38	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar					3 kali	2 kali				3 kali	1 kali					100%	50%
39	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan					40 orang					40 orang						100%	
40	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat					7 lokasi	1 lokasi				7 lokasi	47 lokasi					100%	4700 %
41	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan					60 orang	20 orang				0							
42	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata					1 dokumen	0				1 dokumen						100%	

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

43	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif					0	1				0							
44	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan					40 orang	40 orang				0							
45	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD							10%										
46	proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)							5.5%										
47	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							1 kegiatan										
48	Jumlah entitas pengelolaan destinasi							25										
49	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata							1 destinasi										
50	Jumlah entitas pengelolaan destinasi							1 destinasi										
51	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba							10 orang										
52	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota							13										
53	Jumlah industri usaha pariwisata yang mendapat pembinaan dan pengawasan							13										

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

54	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan							10%										
55	Tingkat hunian akomodasi							50%										
56	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara							377 orang										
57	(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara							177.507 oang										
58	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							5 kali										
59	Jumlah jenis media promosi							4 jenis										
60	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri							3 event										
61	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata							1 dokume n										
62	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri							25										
63	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata							2										
64	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif							30%										
65	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem							3										

	ekonomi kreatif																	
66	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat							10 lokasi										
67	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							100 orang										
68	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							12										
69	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf							35%										
70	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja							12,47%										
71	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar							2 kali										
72	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat							1 lokasi										



73	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							20 orang										
74	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif							1										
75	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							40 orang										



Adapun Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			10%	10%	10%	10%	-82,07%	-45,63%	427%	0	-8,21%	-4,56%	42,7%	0
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota			10%	10%	10%	10%	-57,57%	31,63%	40%	0	-5,76%	3,16%	4,0%	0
3	Tingkat hunian akomodasi			5%	5%	5%	5%	29,95%	21,59%	34,06%	0	5,99%	4,32%	6,81%	0
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			5%	5,20%	5,35%	5,50%	4,10%	4,15%	4,15%	0	82%	78,84%	78,84%	0
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			2,10 %	10%	10%	10%	9,86%	10,33%	16,28%	0	469,50%	103,30%	162,8%	0

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
Program pelayanan administrasi perkantoran	801.806.800,00	491.453.450,00	-		730.626.590	476.975.452	-		91,12	97,05	-		646.630.125,00	603.801.021,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	321.135.500,00	96.620.800,00	-		298.666.957	75.902.300	-		93	78,56	-		208.878.150,00	187.284.628,50
Program peningkatan disiplin aparatur	40.040.000,00	-	-		37.100.000	-	-		92,66	-	-		40.040.000,00	37.100.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30.000.000,00	-	-		16.000.000	-	-		53,33	-	-		30.000.000,00	16.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.099.720,00	12.180.000,00	-		27.944.560	12.180.000	-		96,03	100	-		20.639.860,00	20.062.280,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata	979.498.500,00	-	-		963.979.612	-	-		98,42	-	-		979.498.500,00	963.979.612,00
Program pengembangan destinasi pariwisata	3.194.204.660,00	-	-		3.057.070.534	-	-		95,7	-	-		3.194.204.660,00	3.057.070.534,00
Program pengembangan kemitraan	383.600.000,00	-	-		372.289.500	-	-		91,12	97,05	-		383.600.000,00	372.289.500,00
Program peningkatan kepariwisataan	-	4.034.884.984,00	-		-	2.337.824.988,9	-		93	78,56	-		4.034.884.984,00	2.337.824.988,90

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	-	-	3.416.706.065,00	3.936.592.262,00	-	-	3.316.279.968,00	3.811.256.954,00	53,33	-	97,06	96,82	3.676.649.163,50	3.563.768.461,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	1.212.145.806,00	9.149.914.800,00	-	-	1.162.043.240,00	8.385.533.875,00	96,03	100	95,87	91,65	5.181.030.303,00	4.773.788.557,50
Program Pemasaran Pariwisata	-	-	706.452.763,00	689.439.100,00	-	-	693.543.776,00	672.605.500,00	-	-	98,17	97,56	697.945.931,50	683.074.638,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	1.522.892.000,00				1.517.842.000,00			-	99,67	1.522.892.000,00	1.517.842.000,00
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	274.905.066,00	297.266.000,00	-	-	268.255.066,00	287.945.000,00	-	-	97,58	96,86	286.085.533,00	278.100.033,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yaitu terbatas dalam hal pendanaan sehingga harus mengoptimalkan dengan APBD yang tersedia dan dana pusat seperti DAK non Fisik serta DAK Fisik.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang

RETRIBUSI	2019		2020		2021		2022		Persentase Realisasi			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2019	2020	2021	2022
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	19.200.000	0	0	7.800.000	0	0	0	100
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000	196.825.000	55.000.000	29.000.000	5.000.000	3.200.000	16.200.000	32.000.000	93,80	52,73	64	197,53

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- 2) Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- 3) Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- 4) Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang; dan
- 5) Kreatifitas sumber daya manusia yang tinggi, serta banyaknya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan.

2.4.2 Kelemahan

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penguasaan teknologi;
- 2) Kurangnya inovasi dari sumber daya manusia pariwisata yang ada; dan
- 3) Lemahnya disiplin aparatur;

2.4.3 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
2. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;

3. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
4. Banyaknya event pariwisata baik dalam maupun luar daerah guna meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
5. Banyaknya konsumen produk Ekonomi Kreatif.

2.4.4 Tantangan/ Ancaman

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjalanan yang dilakukan ke Kota Pangkalpinang cenderung untuk perjalanan bisnis/ pekerjaan;
- 2) Tingkat hunian akomodasi belum maksimal dikarenakan kegiatan di hotel hanya sebatas rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi/ pemerintah;
- 3) Masih tingginya inflasi di Kota Pangkalpinang;
- 4) Tuntutan inovasi produk Ekonomi Kreatif; dan
- 5) Pemanfaatan teknologi dalam sektor Ekonomi Kreatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kepariwisataan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan jumlah wisatawan yang datang ke Pangkalpinang semakin meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan PDRB di sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan tantangan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan datang ke Pangkalpinang.

Sehingga dalam menjalankan tujuan tersebut Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Urusan Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
- b. Belum adanya riset pasar wisatawan
- c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
- d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
- e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
- f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
- h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun
- j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Pembentukan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pariwisata di Pemerintahan Kota Pangkalpinang pada khususnya, dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Potensi pengembangan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- b. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- c. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- d. Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang;
- e. Kekayaan alam dan potensi pariwisata;
- f. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
- g. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
- h. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang salah satu tujuan Kota Pangkalpinang adalah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan sasaran Kota Pangkalpinang Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan indikator Realisasi Investasi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dispar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kementerian Pariwisata Misi : Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	S1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi S2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional S3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan S4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional S5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan S6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional S7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif S8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian S9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif S10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke provinsi kepulauan bangka Belitung• Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat• Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN• Kurangnya pemanfaatan teknologi digital• Data kepariwisataan tidak lengkap• Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah• Kurangnya diversifikasi produk wisata di daerah• Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan• Masih banyak SDM pariwisata yang belum memiliki sertifikasi	Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB dijadikan indikator capaian kinerja Pembangunan Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga			
	Sasaran Meningkatkan kunjungan wisatawan	Terbatasnya pengembangan destinasi dan pemasaran serta peningkatan kemitraan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none">- terbatasnya anggaran- kurang optimalnya SDM pariwisata- kurangnya pengembangan daya tarik wisata	Komitmen pemerintah dengan stakeholder dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata pesisir, wisata olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas obyek wisata • Menurunnya jumlah objek wisata 	Banyaknya aktifitas perekonomian seperti penambangan timah inkonvensional, yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat yang tidak mengacu RTRW Kota menyebabkan banyak objek wisata pada destinasi pariwisata maupun cagar budaya yang ada di Pangkalpinang rusak.	Mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Perlu penegakan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan RTRW Kota Pangkalpinang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang, kemudian telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta telaahan rencana tata ruang wilayah serta hasil kesepakatan antar pegawai Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, yaitu :

1. Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai;
4. Terbatasnya pengembangan destinasi dan pemasaran serta peningkatan kemitraan kepariwisataan;
5. Menurunnya kualitas objek wisata; dan
6. Menurunnya jumlah objek wisata.

Maka dapat ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan jangka menengah 3 (Tiga) tahun ke depan yaitu :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan;
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan;
3. Tingkat hunian akomodasi; dan
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Tahun			Akhir Renstra 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatkan potensi pariwisata		Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan	%	16,48	10	19	20	20
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	273.952	214.753	455.493	589.863	589.863
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,12	1	1,06	1,1	1,1
		Tingkat hunian akomodasi	%	34,06	25	40	42	42
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	%	72,57	73,57	74,57	75,57	75,57

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan promosi, kemitraan dan kelembagaan pariwisata.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang;
2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik;
4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

Arah kebijakan di atas menjadi prioritas oleh Dinas Pariwisata dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam Tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan potensi pariwisata	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan promosi, kemitraan dan kelembagaan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang; 2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata; 3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik; 4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan 5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi perangkat daerah. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan fungsi urusan pilihan pariwisata.

Berikut pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota
Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

	Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran
		Fasilitasi pemberian insentif
		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

Secara rinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada tabel berikut :

KERANGKA KINERJA
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2024-2026

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan						Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	9,27	4		4,25		4,5		4,5		Kepala Daerah
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah					Realisasi Investasi		Milyar	438,1	500		525		550		550		
		Meningkatkan potensi pariwisata				Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan	Jumlah PAD sektor pariwisata tahun berkenaan / Total PAD tahun berkenaan x 100%	%	16.48	10		19		20		20		KEPALA DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata			Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun berkenaan	orang	273.952	214.753		455.493		589.863		589.863		KEPALA DINAS PARIWISATA
						Rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan tahun berkenaan	hari	1,12	1		1.06		1.1		1.1		
						Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100 %	%	34,06	25		40		42		42		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP	Nilai	73,18	73.30	4,087,809,343	73,42	4,372,394,017	73,50	4,433,193,315	73,50	12,893,396,675	SEKRETARIS
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	100	100		100		100		100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	8	3,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	3	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	12	3,000,000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	12	3,000,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	3,404,388,991	100	3,489,388,289	100	3,576,587,587	100	10,470,364,867	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ bulan	32	34	3,401,388,991	34	3,486,388,289	34	3,573,587,587	134	10,461,364,867	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD		Laporan	17	17	1,000,000	17	1,000,000	17	1,000,000	68	3,000,000	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	Jumlah barang milik perangkat daerah yang dinventaris dan dikelola sesuai ketentuan (unit) dibagi Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada (unit) x 100 %	%	100	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	6,000,000	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya penerimaan retribusi daerah terhadap PAD	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	Jumlah realisasi kontribusi daerah tahun berkenaan dibagi jumlah total realisasi PAD tahun berkenaan x 100%	%	0,020	0,56	1,000,000	0,56	1,000,000	0,56	1,000,000	0,56	3,000,000	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	(Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu) dibagi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %	%	0	0	30,500,000	0	57,400,000	0	57,400,000	0	145,300,000	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1	1	24,500,000	1	36,400,000	1	36,400,000	4	97,300,000	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	0	5	5,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	15	45,000,000	

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	117,000,000	100	232,000,000	100	182,000,000	100	531,000,000	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	15,000,000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	25,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	105,000,000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	0	0	-	1	50,000,000	0	-	1	50,000,000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	60,000,000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	8	45,000,000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	250,000,000	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	100	37,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100	57,000,000	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	40	30	37,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	74	57,000,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	369,716,960	100	372,716,960	100	372,716,960	100	1,115,150,880	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	4	270,000,000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	29,000,000	1	29,000,000	1	29,000,000	4	87,000,000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	250,716,960	1	253,716,960	1	253,716,960	4	758,150,880	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	100	119,203,392	100	200,888,768	100	224,488,768	100	544,580,928	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	1	1	61,931,696	1	61,931,696	1	61,931,696	4	185,795,088	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	4	105,000,000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		Unit	1	1	22,271,696	1	103,957,072	1	127,557,072	4	253,785,840	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata	Persentase daya tarik wisata pemerintah yang dikembangkan kualitasnya	Jumlah daya tarik wisata pemerintah yang dikembangkan kualitasnya / Jumlah seluruh daya tarik wisata x 100 %	%	6	6	692,107,488	6	712,107,488	6	732,107,488	6	2,136,322,464	BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik yang Ditetapkan dibagi dengan Jumlah Daya Tarik Keseluruhan x 100%	%	0	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	45,000,000	
				Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Lokasi	61	61	15,000,000	61	15,000,000	61	15,000,000	61	45,000,000	
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola dibagi Kawasan Strategis Keseluruhan x 100%	%	25	50	25,000,000	75	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Dokumen	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	60,000,000	
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Laporan	0	1	5,000,000	1	5,000,000	2	5,000,000	4	15,000,000	
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikelola pemerintah dibagi Jumlah Destinasi keseluruhan x 100%	%	100	100	637,107,488	100	657,107,488	100	677,107,488	100	1,971,322,464	
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		Unit	14	16	622,107,488	17	642,107,488	17	662,107,488	17	1,926,322,464	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Laporan	4	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10	45,000,000	
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri yang memiliki TDUP dibagi Jumlah Industri Pariwisata Keseluruhan x 100%	%	73,07	75	15,000,000	77	15,000,000	79	15,000,000	79	45,000,000	
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi		Usaha	500	520	15,000,000	530	15,000,000	540	15,000,000	2090	45,000,000	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tercapainya Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dipasarkan dibagi Daya Tarik Wisata di Wilayah Pangkalpinang x 100%	%	35	37	350,872,160	38	472,086,784	39	527,086,784	39	1,350,045,728	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan	Event	2	5	350,872,160	5	472,086,784	5	527,086,784	17	1,350,045,728	
						Persentase data pariwisata yang dikelola	Data pariwisata yang dikelola dibagi data pariwisata yang tersedia dikali 100%	%	100	100		100		100				

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15
					Kabupaten/Kota	Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata dibagi Jumlah Industri pariwisata keseluruhan dikali 100%	%	0	5		5		5		5		
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	30,000,000	
				Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	30,000,000	
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Dokumen	1	1	3,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	13,000,000	
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Kegiatan	1	1	150,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	4	700,000,000	
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Promosi	1	1	177,872,160	1	197,086,784	1	202,086,784	4	577,045,728	
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah					Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB		%	18.02	19.27		20.52		21.77		21.77		KEPALA DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif keseluruhan x 100%	%	72.57	73.57		74.57		75.57		75.57		KEPALA DINAS PARIWISATA
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah ekonomi kreatif yang dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah / Jumlah ekonomi kreatif yang ada x 100 %	%	17	28.08	55,000,000	34.61	155,000,000	41.14	60,000,000	41.14	270,000,000	BIDANG EKONOMI KREATIF
				Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh Insentif dibagi Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif keseluruhan dikali 100%	%	33.33	67	55,000,000	83	155,000,000	100	60,000,000	100	270,000,000	

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		Dokumen	0	1	55,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	75,000,000	
				Fasilitasi pemberian insentif	Terlaksananya fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan		Pelaku Usaha	8	0	-	4	40,000,000	4	25,000,000	16	65,000,000	
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Terlaksananya bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah		Pelaku Usaha	0	0	-	5	100,000,000	1	20,000,000	6	120,000,000	
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Laporan	0	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pendidikan dan pelatihan (orang) / Jumlah pelaku ekonomi kreatif seluruhnya (orang) x 100 %	%	13.06	22	195,000,000	32	200,000,000	42	290,000,000	42	685,000,000	BIDANG EKONOMI KREATIF
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terwujudnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih dibagi jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikali 100%	%	23,53	24	155,000,000	25	160,000,000	26	245,000,000	26	560,000,000	
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Laporan	1	0	-	1	120,000,000	1	120,000,000	3	240,000,000	
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Orang	20	0	-	30	30,000,000	30	30,000,000	80	60,000,000	
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		Orang	35	40	155,000,000	35	10,000,000	35	95,000,000	145	260,000,000	
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang disertifikasi dibagi Jumlah keseluruhan SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif dikali 100%	%	3.65	4	40,000,000	4.5	40,000,000	5	45,000,000	5	125,000,000	

Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021/2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										2024		2025		2026				
										Tahun 2021 / 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Orang	15	40	20,000,000	30	25,000,000	30	30,000,000	115	75,000,000	
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif		Orang	0	20	20,000,000	7	15,000,000	10	15,000,000	37	50,000,000	
TOTAL											5,380,788,991		5,911,588,289		6,042,387,587		17,334,764,867	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Kota Pangkalpinang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024-2026

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
						2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	9,27	4	4,25	4,5	4,5
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Realisasi Investasi	Milyar	438,1	500	525	550	550
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah		Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	%	18,02	19,27	20,52	21,77	21,77
3	Meningkatkan potensi pariwisata		Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan	%.	10,33	10	19	20	20
4	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	273.952	214.753	455.493	589.863	589.863
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,12	1	1,06	1,1	1,1
			Tingkat hunian akomodasi	%	34,06	25	40	42	42
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin	%	72,57	73,57	74,57	75,57	75,57

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,18	73,30	73,42	73,50	73,50
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	100	100	100	100	100
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya	%	6	6	6	6	6
7	Program Pemasaran Pariwisata	Tercapainya Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	%	35	37	38	39	39
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	17	28,08	34,61	41,14	41,14
9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	%	13,06	22	32	42	42

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sejak dikeluarkannya dokumen ini sampai dengan tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.